

WOKE CAPITALISM DAN DAMPAKNYA SECARA SOSIO-POLITIK: PERUBAHAN MENDASAR AGENDA KEADILAN SOSIAL DARI ISU EKONOMI KE POLITIK IDENTITAS

Gusti Patading

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pelita Harapan

e-mail: gusti.patading@uph.edu

ABSTRAK

Artikel jurnal ini hendak mengkaji bagaimana agenda *woke* masuk ke dalam arena ekonomi dan membawa perubahan mendasar pada konsep keadilan sosial lalu menganalisis dampaknya. Istilah *woke* yang berkembang dalam masyarakat Amerika Serikat melambangkan kesadaran akan isu-isu sosial dan gerakan melawan ketidakadilan, ketidaksetaraan, dan prasangka. Adapun terminologi yang khas dan jamak digunakan oleh para penganut pemikiran ini yakni keberagaman, kesetaraan, dan inklusi. Dalam perkembangannya, istilah ini digunakan pula dalam konteks makna peyoratif, yakni seseorang yang menjalankan moralitas yang keliru, dangkal dan berdasarkan pada kebenaran politis. Fenomena *woke capitalism* sendiri dimaknai sebagai sebagai aktivisme korporat yang memainkan trik tampil progresif di hadapan masyarakat sembari tetap memperoleh keuntungan besar dari kebijakan ekonomi kapitalis. Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan studi literatur, data dan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis diolah secara kualitatif. Penulis menemukan bahwa dalam jangka pendek, aktivisme perusahaan dalam agenda-agenda *woke* mungkin memberi dampak positif pada meningkatnya citra dari perusahaan dan produknya di kalangan generasi muda. Namun, dalam jangka panjang, sangat sulit untuk mendamaikan kepentingan politik identitas dengan mekanisme dan logika pasar. *Woke capitalism* nampak memiliki masa depan yang suram karena hukum logika pasar sudah terbukti langgeng sepanjang sejarah peradaban manusia.

Kata kunci: Kapitalisme, Marxisme, *Woke Capitalism*, Keadilan Sosial, Pemikir Kiri, Teori Ras Kritis

ABSTRACT

This journal article aims to analyze how the woke agenda enters the arena of economy and brings fundamental changes to the concept of social justice, and then further analyze the impact. The term woke, which developed in the community of the United States, symbolizes the awareness of social issues and the movement against injustice, inequality, and stereotypes. Other various terms used by the followers of this term, including diversity, equality, and inclusivity. In its development, the term also used in the pejorative fashion, in which someone is implying false, shallow, and politically driven morality. The woke capitalism itself can be defined as a corporate activism that plays the progressive tricks in front of the society while at the same time keep gaining huge benefits from the capitalism economic policy. The research method is the literature study, and the data and information acquired from written sources and analyzed qualitatively. The author finds that in the short time, corporate activism from the woke agendas may provide positive impact towards the image of the corporate and the products for the younger generation. However, in the long term it is going to be extremely difficult to make peace between the interest of identity politics with the logic and the mechanism of the market. It looks like the woke capitalism has a horrible future because the law of market logic has been proven to be sustainable during the entire history of humanity.

Keywords: Capitalism, Marxism, Woke Capitalism, Social Justice, Leftist, Critical Race Theory

1. Pendahuluan

Meski sudah mulai dikenal dan pertama kali digunakan pada tahun 1940-an, istilah *woke* dan *wokeness* baru benar-benar populer sebagai sebuah terminologi pada dua

dekade terakhir. Istilah yang berkembang dalam masyarakat Amerika Serikat melambangkan kesadaran akan isu-isu sosial dan gerakan melawan ketidakadilan, ketidaksetaraan, dan prasangka. Adapun

terminologi yang khas dan jamak digunakan oleh para penganut pemikiran ini yakni keberagaman, kesetaraan, dan inklusi.

Jika ditelusuri, gagasan *woke* memiliki kaitan sangat erat dengan Teori Kritis (*Frankfurt School*) yang berakar pada Marxisme bahkan sering dipadankan dengan Neo-Marxisme dan Marxisme Kultural. Kamus Oxford memberi definisi yang sangat luas untuk kata *woke* sebagai sebuah kata sifat yang berarti “waspada terhadap masalah sosial dan politik, terutama rasisme.” (Oxford Learner’s Dictionary, n.d.).

Istilah *woke* yang pada awalnya sangat identik dengan budaya kulit hitam Amerika, kemudian menjadi istilah yang populer dipakai oleh semua kalangan terutama oleh liberal yang didominasi kulit putih merujuk pada kondisi sadar dan waspada akan semua jenis ketidakadilan berbasis identitas (Ramaswamy, 2021).

Namun, ada pula penstudi yang menambahkan bahwa terdapat pergeseran atau minimal penambahan makna dari istilah *woke* dari yang versi konvensional, yakni menjadi seorang yang sadar dan waspada terhadap ketidakadilan sosial menjadi seseorang yang menjalankan moralitas yang keliru, dangkal dan berdasarkan pada kebenaran politis (Rhodes, 2022).

Dengan menelusuri asal-usul serta makna dari terminologi *woke*, maka dapatlah kita melihat gambaran awal ketika istilah ini dipadankan dengan kapitalisme menjadi *woke capitalism*. Kolumnis The New York Times, Ross Douthat menggambarkan *woke capitalism* sebagai aktivisme korporat yang memainkan trik tampil progresif di hadapan masyarakat AS sembari tetap memperoleh keuntungan besar dari kebijakan ekonomi sayap kanan ala Trump terutama kebijakan pemotongan pajak korporasi (Rhodes, 2022).

Dengan gambaran demikian penulis melihat kelihaihan kapitalis dalam memanfaatkan agenda-agenda *woke* yang cenderung anti pada prinsip-prinsip dasar kapitalisme serta berpikir dapat memaksa entitas-entitas bisnis raksasa tersebut untuk tunduk pada agenda mereka adalah suatu

kekeliruan besar. Sebaliknya, yang terjadi justru perusahaan-perusahaan besar berhasil meningkatkan citra positif mereka di mata masyarakat dengan terlihat mendukung penuh agenda-agenda keadilan sosial versi Perspektif Kritis sementara praktik bisnis mereka berjalan seperti biasa bahkan semakin populer terutama di kalangan anak muda yang sangat responsif dengan isu-isu keadilan sosial. Dampak negatif selanjutnya adalah tekanan terhadap perusahaan untuk melaksanakan aktivitas *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang nyata dan fundamental, seperti di area pengembangan ekonomi, yang membuat kualitas pendidikan dan kesehatan menjadi menurun, bahkan cenderung terabaikan.

Salah satu agenda *woke* yang paling populer dalam diskusi publik saat ini adalah isu ketidakadilan rasial, kaum *leftist* menggaungkan sebuah teori yang disebut *Critical Race Theory*, pada dasarnya menyatakan ada ketidakadilan struktural yang mengakar dalam masyarakat terutama dalam konteks sejarah Amerika Serikat terkait perbudakan ras kulit hitam di masa lalu. Strachan (2021) menyebut *Critical Race Theory* pada dasarnya adalah pemikiran Neo-Marxisme yang diperkuat dengan posmodernisme, sudut pandang yang secara sinis dijadikan senjata mendekonstruksi dan membongkar struktur sosial.

Membicarakan agenda keadilan berdasarkan ras ini menjadi sangat penting karena *woke capitalism* sebagian besar diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan perusahaan yang khusus merespons isu rasial. Detil dari fenomena tersebut akan dibahas di bagian lain dari tulisan ini. Tujuan penulis membahas *woke capitalism* adalah untuk memahami pengaruh dan dampak dari fenomena ini terhadap bisnis dan masyarakat umum.

2. Tinjauan Pustaka

K.R. Bolton dalam artikel berjudul “Cultural Marxism, Origin, Development and Significance” (Bolton, 2018) menguraikan bahwa Marxisme Kultural

mengakar pada tradisi kritis dimana “mendekonstruksi” moralitas Barat tidak hanya dalam hal ekonomi, sebagaimana yang dilakukan oleh Marxisme awal, tetapi mempertanyakan apakah moralitas tradisional Barat menyebabkan neurosis dan kesiapan untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial. Dalam tradisi Marxisme, ideologi dominan adalah ideologi kaum borjuis untuk mengendalikan kaum proletar dan kelas pekerja,

Marxisme Kultural menganggap budaya dan ideologi sebagai sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari konteks ekonomi, sosial, dan politik; keduanya adalah alat di tangan kaum berkuasa untuk mengendalikan rakyat. Di sini letak kebaruan sekaligus perbedaan dari fenomena *woke capitalism* karena kaum kiri baru ini percaya bahwa konteks sosial bisa muncul sebagai variabel yang tidak selalu takluk pada konteks ekonomi seperti keyakinan Marxisme. Kesetaraan dan proses emansipasi di area di luar ekonomi tidak kalah penting dan signifikan untuk diberi perhatian. Kritik teori-teori Kritis tentang pengabaian isu-isu lain seperti gender, ras, lingkungan oleh Marx semakin terlihat buktinya disini.

Tulisan Carl Rhodes berjudul “Woke Capitalism: How Corporate Morality is Sabotaging Democracy” (Rhodes, 2022) menguraikan sejarah *woke* secara umum, dan bagaimana gerakan ini kemudian menjadi akrab dengan para pemilik bisnis. Rhodes menjelaskan mengapa kapitalis tertarik pada gagasan *woke* dalam dunia bisnis. Literatur ini mempertimbangkan dampak korporasi yang mengambil posisi politik *woke* dengan antusiasme yang tinggi. Literatur ini mengeksplorasi bagaimana kapitalisme sadar merupakan dimensi yang berkembang dan meresahkan dalam kehidupan ekonomi dan politik kontemporer, terutama di antara korporasi multinasional raksasa yang mendominasi banyak aspek kehidupan kita.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, peneliti mengumpulkan data

dan informasi yang diperlukan dengan menelaah sumber-sumber tertulis baik itu buku, jurnal maupun situs-situs yang relevan. Data-data yang dikumpulkan adalah data sekunder, di mana peneliti mengumpulkan data dengan membaca dan mencatat lalu mengolah bahan penelitian. Data dan informasi yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode kuantitatif.

4. Hasil dan Pembahasan

Marx yang awalnya dianggap sebagai alternatif utama dalam pemikiran politik sekaligus akar dari perspektif kritis membuat pembeda yang sangat jelas antara area ekonomi yang dianggapnya sebagai dasar sejati dari kehidupan manusia dengan bidang yang lain, seperti hukum dan kebudayaan yang merupakan *superstructure* yang dihasilkan sekaligus merefleksikan ekonomi. “*For Marx, politics, together with law and culture, are part of a ‘superstructure’ that is distinct from the economic ‘base’ that is the real foundation of social life.*” (Heywood, 2019). Bagi Marx, ekonomi tetap adalah kekuatan utama yang mengendalikan perkembangan sejarah dan peradaban. Dengan demikian, membicarakan gagasan seperti keadilan sosial (*social justice*) tidak mungkin lepas dari persoalan ekonomi.

Keadilan sosial sendiri adalah ide yang menarik perhatian umat manusia terutama para ilmuwan sosial sejak lama. Para pemikir klasik seperti Plato, Emmanuel Kant, hingga Aquinas semuanya memiliki perhatian khusus pada konsep keadilan sosial. Ide ini adalah sentral dari gagasan Marxisme untuk menghapuskan kelas dan menciptakan masyarakat komunis yang menjamin kesamarataan dalam hal ekonomi. Diawali dengan kesadaran kelas, di mana kelas pekerja menyadari sifat eksploitatif dari sistem ekonomi kapitalis, lalu bangkit dan melawan penindasan dan eksploitasi oleh para pemilik modal.

Analisis Marx berakar pada materialisme historis, yang percaya bahwa mode produksi ekonomi menentukan dan membentuk suprastruktur, seperti lembaga

politik, hukum, dan budaya. Dalam pemikiran Marxisme, keadilan sosial dicapai melalui revolusi sosial di mana faktor produksi diambil alih dan dimiliki secara kolektif. Hal ini merupakan cara paling efektif untuk menghapuskan kepemilikan pribadi yang menjadi penyebab utama adanya kesenjangan antarkelas sekaligus memastikan bahwa sumber daya yang ada dapat terdistribusi secara merata sesuai kebutuhan masing-masing. Hanya dengan jalan itulah keadilan sosial bisa diwujudkan.

Sementara itu, meski masih mewarisi semangat emansipatif dari Marxisme, perspektif kritis yang baru memperluas hirauan dari ekonomi ke beragam bidang lain sehingga menciptakan pengaruh yang luas. “*Critical theory, which is rooted in the neo-Marxism of the Frankfurt School, has extended the notion of critique to all social practices, drawing on a wide range of influences.*” (Heywood, 2019).

Pendekatan kritis sendiri memiliki dua karakteristik utama. Pertama, pemikiran-pemikiran ini dianggap kritis karena mereka senantiasa menentang *status quo* dengan menyelaraskan kepentingan mereka dengan kelompok-kelompok marginal dan tertindas. Kedua, mereka berupaya melampaui positivisme dari politik arus utama dan menekankan peran kesadaran dalam membentuk perilaku sosial dan pada akhirnya, dunia politik (Heywood, 2019).

Karakter emansipatif pendekatan kritis mengungkap ketidaksetaraan yang cenderung diabaikan oleh pendekatan arus utama. Feminisme dengan ketidakadilan di area gender tradisional lalu dilanjutkan dengan feminisme radikal bahkan oleh *queer theory*¹ pada area gender-gender yang baru. Politik Hijau memusatkan perhatian pada ketidakadilan terhadap lingkungan oleh semua perspektif yang bersifat antroposentris. Posmodernisme membahas ketidakadilan dalam produksi pengetahuan.

Perluasan topik dari ketidakadilan yang awalnya terbatas pada persoalan

ekonomi ke berbagai bidang lain ini yang membuat kita dapat menarik benang merah antara pemikiran Marxisme, Neo-Marxisme, mazhab Frankfurt, hingga ke Teori-teori Kritis yang di dalamnya mencakup area yang luas, termasuk ketidakadilan ras dan kategori gender baru yang dikenal dengan *Wokeism*. “*Critical international theory adapts and extends Frankfurt School critical theory (and other critical theorists’) concepts and ideas to the international level in order to interpret and/or understand the global phenomena driving the emancipatory struggle.*” (Dunne, et al, 2010: 172).

Namun, mengenai perluasan ini -yang penulis lebih memilih menyebutnya sebagai perubahan mendasar pada topik hirauan-mendatangkan konsekuensi yang besar. Topik-topik mengenai keadilan ekonomi yang sudah sangat lama dianggap penting dan sangat mendasar sebagai pusat perhatian utama dalam politik global, bahkan menjadi salah satu isu inti dari ekonomi politik global, pelan-pelan mulai ditinggalkan. Tekanan terhadap perusahaan-perusahaan besar serta pemerintah negara-negara yang selama ini berpusat pada pertanyaan mengenai bagaimana komitmen mereka untuk menyejahterakan kelas pekerja kemudian berubah menjadi tuntutan-tuntutan baru seperti penghapusan rasisme, keberpihakan terhadap kelompok-kelompok marginal terutama perempuan dan kelompok LGBTQ+, serta permasalahan lingkungan.

Dunia bisnis kemudian merespons tuntutan-tuntutan tersebut dengan mengakomodir agenda-agenda *woke* dalam praktek bisnis dan kampanye mereka. Dari proses inilah kemudian muncul terminologi *Woke Capitalism*, sebuah istilah yang merangkum bagaimana para pemilik bisnis raksasa dunia merangkul ide-ide kesetaraan dan keadilan sosial untuk kepentingan mereka. “*The term "woke capitalism" was coined by Ross Douthat in 2015 to describe how companies signal support for progressive causes to maintain influence in*

¹ Sebuah bidang studi interdisipliner yang mengkaji dan mengkritik norma-norma sosial serta

struktur kekuasaan yang terkait dengan gender dan seksualitas.

society. This mindset has grown, with large corporations often siding with leftist policies." (The Heritage Foundation, 2021). Dalam hal ini, perusahaan-perusahaan menunjukkan dukungan terhadap agenda-agenda kelompok *leftist* guna menjaga citra positif dan pengaruh mereka di masyarakat.

Karakter khas dari teori-teori yang mengakar pada Marxisme adalah klaim moral atas agenda-agenda mereka. Ide mengenai keadilan sosial berpusat dan mendapat kekuatan besar dari pada filsafat moral dan etika Marx mengenai keberpihakan pada yang lemah dan marginal, sebagai landasan kritik terhadap Kapitalisme. Karakteristik ini sangat mudah menarik perhatian dan diterima oleh masyarakat umum terlebih bagi kaum muda. Adapun sinyal-sinyal ketidakselarasan pada ide keberpihakan tersebut bisa dengan cepat mengundang kecaman dari publik, yang jika terus bergulir akan berakhir pada upaya boikot produk yang dikenal dengan istilah *cancel culture*. Hal inilah yang menarik sekaligus memaksa dunia bisnis memberi porsi yang signifikan bagi isu-isu keadilan sosial jenis baru ini.

Pertanyaan penting selanjutnya adalah apa tujuan pebisnis mengadopsi agenda *woke*? Alasan utama perusahaan-perusahaan besar mendukung agenda-agenda *woke* tidak lain adalah karena mereka memang melihat keuntungan dibaliknya.

Memanfaatkan kepedulian konsumen, korporasi kemudian ikut menjadi aktivis dan memperjuangkan ketidakadilan. Kampanye ketidakadilan sosial perusahaan-perusahaan selalu mengedepankan figur-figur yang dianggap mewakili kelompok-kelompok marginal dan tertindas seperti kelompok kulit hitam, homoseksual, transgender, penderita obesitas, dan lainnya. Contohnya, perusahaan *apparel* Nike yang menampilkan Colin Kaepernick olahragawan sekaligus aktivis kulit hitam, iklan Budweiser yang menampilkan Dylan Mulvaney seorang *influencer* transgender, dan pandangan Gillette tentang maskulinitas toksik adalah beberapa contoh paling banyak dibicarakan.

Penerapan *woke capitalism* sendiri dikembangkan sedemikian rupa dengan menciptakan sistem pengukuran seperti Social Credit Score serta The Corporate Equality Index (CEI) Score. Sebuah organisasi bernama HRC menilai seberapa *woke* suatu perusahaan dengan standar seperti komitmen perusahaan mematuhi standar lingkungan, sosial, dan tata kelola, yang menekankan tanggung jawab sosial dan keberlanjutan. Generasi muda, khususnya Gen Z, adalah generasi yang lebih sadar sosial dan mengharapkan perusahaan untuk mencerminkan nilai mereka. Pergeseran demografis ini memengaruhi strategi perusahaan untuk selaras dengan tujuan menarik dan mempertahankan pelanggan.

Investor juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan perusahaan. Mereka sering mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik yang bertanggung jawab secara sosial dan mendukung tujuan progresif untuk mempertahankan portofolio investasi dan reputasi mereka.

Ada begitu banyak contoh dari perilaku entitas bisnis global yang menyelaraskan aktivitas bisnis mereka dengan agenda *woke* atau lebih dikenal dengan istilah *go woke*. Pada Februari 2014, Meta sang perusahaan induk Facebook sebagai media sosial dengan tiga milyar pengguna, mengumumkan pembaharuan pada list gender yang tersedia bagi para penggunanya di platform mereka (Meta Diversity, 2014). Facebook membuat lebih dari 50 opsi gender baru untuk dipilih oleh penggunanya. Perusahaan perfilman Disney melakukan perubahan radikal pada banyak karakter terutama pada preferensi seksual dan identitas gender baru mereka. Hal ini dilakukan untuk menyelaraskan dengan agenda *woke* yang dianggap sebagai bukti inklusivitas dan toleransi Disney.

Fenomena *woke capitalism* yang lebih nyata lagi terlihat dalam kasus perusahaan *apparel* olahraga Nike yang sangat vokal dalam mendukung berbagai agenda *social justice*, termasuk Black Lives Matter (BLM) dan hak-hak LGBTQ+ (Serazio, 2024). Tidak hanya berupa

kampanye dan dorongan moral, Nike telah mengumumkan inisiatif amal yang signifikan, seperti komitmen sebesar 40 juta Dollar Amerika Serikat selama empat tahun untuk mendukung komunitas kulit hitam di AS, yang menunjukkan kesediaan mereka untuk mendukung nilai-nilai keadilan sosial mereka dengan menyumbangkan uang. Tidak berhenti sampai di situ, Nike bahkan berkomitmen menyuburkan keberagaman dan inklusivitas dalam manajemen perusahaannya. Mereka telah menerbitkan data keberagaman karyawan yang menunjukkan upaya sistematis perusahaan untuk memastikan pekerja mereka datang dari berbagai latar belakang gender, ras, dan identitas yang lain. Mereka menyiapkan program pelatihan keberagaman dan bertujuan untuk menempatkan lebih banyak perempuan dan kelompok minoritas pada posisi pimpinan.

Kekuatan dari *wokeness* adalah dengan mudah mereka menggunakan landasan moral atas klaim-klaim seperti keadilan, *compassion*, keberpihakan pada yang lemah untuk membuatnya populer di kalangan generasi muda. Hal yang dilakukan Nike dalam rekrutmen dan promosi karyawannya misalnya, oleh anak-anak muda terlihat sangat menarik dan layak didukung karena menghilangkan kesan dominasi oleh kelompok identitas tertentu. “Bahkan kita memiliki kultus keadilan sosial kiri, sebuah agama yang para pengikutnya menunjukkan semangat yang sama dengan para penganut Kristen Injili yang telah lahir baru.” (Mirzaei, 2023). Hal ini bisa menjadi kekuatan yang sangat besar karena para pendukung agenda *woke* memiliki keyakinan bahwa mereka sedang memperjuangkan kebajikan.

Namun, elemen klaim moral dan etika yang melandasi gerakan seperti *Woke Capitalism* juga menciptakan masalah besar dengan membuat pihak lain yang tidak sejalan dengan agenda kelompok ini sebagai layak dibungkam dan diasingkan seperti yang terlihat jelas dalam fenomena *cancel culture*²

yang sangat populer digunakan oleh kelompok *leftist*. Perilaku demikian meskipun dipermukaan nampak sebagai perjuangan untuk menghargai keberagaman, keadilan, dan inklusivitas, namun pada akhirnya justru mematikan keberagaman sejati yakni keberagaman pemikiran. “*Wokeness sacrifices true diversity, diversity of thought, so that skin-deep symbols of diversity like race and gender can thrive.*” (Ramaswamy, 2021).

Masih perlu waktu untuk melihat perkembangan dan dampak jangka panjang dari *woke capitalism* terhadap dunia bisnis dan masyarakat secara luas. Kecenderungan perusahaan raksasa untuk bersekutu dengan aktivis *leftist* dari berbagai berbasis perjuangan seperti ras, gender, komunitas lokal, hingga lingkungan akan membuat mereka mendapat citra positif dari masyarakat. Dengan kata lain, perusahaan-perusahaan ini akan semakin memiliki *power* dalam berurusan dengan pemerintah. Hal ini juga berarti mereka akan semakin mudah untuk menghindari atau minimal meringankan kewajiban-kewajiban “tradisional” yang selama ini dibebankan ke mereka mulai dari pajak hingga CSR.

Mengapa menyelaraskan bisnis dengan ide-ide *wokeness* memang dapat memiliki pengaruh yang kuat bagi masyarakat? Hal ini bisa dijawab dengan memperhatikan argumen moral yang dibawa oleh ideologi ini. Dia bukan hanya sekedar ideologi, tetapi juga klaim moral sama seperti yang bisa ditemukan dalam Marxisme yang menarik begitu banyak anak muda dengan ide keberpihakannya pada yang lemah dan sikap permusuhan terhadap kelas dominan.

Semakin sesuai dengan agenda *wokeness*, sebuah perusahaan dapat semakin terlihat bermoral, berpihak pada kelompok tertindas dan tersisihkan, dan membuat citra perusahaan akan terdongkrak, yang pada akhirnya terbukti berpengaruh positif dan

² Fenomena ketika suatu komunitas secara kolektif menarik dukungan dari individu, kelompok, atau entitas sebagai respons terhadap tindakan yang

dianggap salah atau tindakan yang tidak dapat diterima secara sosial.

signifikan terhadap penjualan, terutama di kalangan anak muda.

Menciptakan narasi positif di publik akan meningkatkan reputasi perusahaan, membantu membangun kepercayaan konsumen sama seperti ide Corporate Social Responsibilities (CSR) yang sudah lebih dahulu dikenal. Bedanya adalah CSR yang selama ini dikenal, berdampak umum dan memiliki target yang luas, umumnya terkait lingkungan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Agenda *woke* mempromosikan kepentingan sekelompok kecil masyarakat dan cenderung mengedepankan isu-isu yang tidak fundamental dan bersifat subyektif seperti isu identitas.

Mendukung agenda *woke* dapat bermanfaat bagi bisnis dalam beberapa cara, antara lain meningkatkan reputasi dan kepercayaan. Dengan menyelaraskan tujuan yang sadar sosial, perusahaan meningkatkan reputasi dan membangun kepercayaan dengan konsumen yang menghargai tanggung jawab sosial. Hal ini akan mengarah pada peningkatan loyalitas dan retensi pelanggan, serta liputan media positif.

Kemungkinan untuk menarik minat dari konsumen yang lebih muda juga meningkat drastis dengan memperlihatkan dukungan pada isu-isu yang memang menarik perhatian mereka. Merangkul isu sosial dapat membuat perusahaan lebih relevan dan menarik bagi konsumen yang lebih muda yang semakin sadar sosial. Kelompok demografi ini lebih cenderung mendukung merek yang menunjukkan komitmen kuat terhadap agenda-agenda keadilan sosial.

Seperti telah diuraikan sebelumnya, perusahaan membangun citra positif di publik dengan menunjukkan komitmen serius terhadap isu-isu sosial. Upaya ini memiliki dampak lanjutan, yakni dapat menumbuhkan narasi publik yang positif di sekitar perusahaan. Liputan media yang menguntungkan dan persepsi publik yang lebih baik sangat penting dalam lanskap konsumen yang sadar sosial saat ini. Memastikan bahwa tindakan perusahaan

tidak dianggap sebagai sesuatu yang dangkal atau oportunistik, melainkan sebagai upaya yang sungguh-sungguh untuk memberikan dampak positif.

Jika kapitalisme yang menjunjung tinggi efisiensi dan tujuan akhir keuntungan finansial mendukung agenda *woke*, artinya ada hal yang menarik kapitalis untuk melakukannya. Dalam menjalankan bisnis yang etis dan bermoral, perusahaan-perusahaan seperti dilepaskan dari beban untuk bertanggung jawab atau berkontribusi di area ekonomi masyarakat secara umum. Agenda-agenda *woke* memungkinkan kapitalis mendapat validasi publik sebagai pelaku bisnis yang etis dan bermoral, cukup dengan peduli dan berpihak pada kepentingan segelintir kecil kelompok masyarakat. Lebih menarik lagi dari sisi bisnis, karena program-program tersebut bisa dicapai dengan biaya yang jauh lebih murah, dibandingkan dengan tanggung jawab sosial di area yang nyata seperti pengembangan ekonomi masyarakat.

5. Kesimpulan

Wokeness yang didalamnya mengakar kuat ide emansipasi khas teori-teori kritis telah mengalihkan perhatian publik dari persoalan ketimpangan ekonomi sebagai isu utama selama beberapa dekade ke persoalan keberpihakan dan emansipasi bagi kelompok-kelompok berbasis identitas.

Dengan melihat fenomena *woke capitalism* dari sudut pandang yang sudah dipaparkan penulis, diharapkan dapat menjadi bahan kajian terutama bagi para ilmuwan sosial bahkan para aktivis untuk mempertimbangkan kembali strategi beraliansi dengan kapitalis dalam isu-isu *social justice*. Bukan karena kapitalisme pada dasarnya jahat, namun mengganti hirauan entitas bisnis dari pokok-pokok masalah ekonomi menjadi diskusi dan keprihatinan di area identitas, berarti pula mengalihkan mereka dari area spesialisasinya sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk berkontribusi nyata dan optimal. Dalam kasus perusahaan harus berkompromi terkait

persoalan rekrutmen karyawan misalnya, ini secara teknis berarti pertimbangan kompetensi tidak lagi menjadi variabel utama dalam merekrut maupun menempatkan karyawan pada posisi tertentu. Hal paling pertama yang jadi pertimbangan adalah pemerataan dan keterwakilan kelompok-kelompok yang dianggap marginal dan selama ini tidak terwakilkan. Ini kondisi yang benar-benar melanggar prinsip efektivitas dan efisiensi bisnis.

Perusahaan meresikokan performa dan kompetensi pegawainya demi memenuhi tuntutan agenda *woke*. Sejalan dengan itu, kritik-kritik tajam terus menerpa perusahaan-perusahaan yang dianggap terlalu fokus pada isu-isu keadilan sosial dan lingkungan dan melupakan tanggung jawab utama sebuah entitas bisnis untuk menghasilkan keuntungan ekonomi. Pada akhirnya, kita akan kembali diingatkan tentang bagaimana ekonomi dan bisnis, atau oleh ekonom klasik disebut “pasar”, memiliki logika dan hukumnya sendiri. Kita tidak memilih membeli sepotong roti kepada penjual roti karena dia dari ras tertentu, atau gender dan orientasi seksual tertentu. Faktor identitas sangat sulit dijadikan pertimbangan dalam

keputusan-keputusan ekonomi. Konsumen selalu membeli berdasar logika ekonomi: kualitas terbaik, dengan harga terbaik.

Adapun keuntungan yang didapatkan perusahaan yang *go woke* dengan peningkatan penjualan sebagai konsekuensi dari citra positif yang diciptakan media dan berhasil menarik konsumen, khususnya dari kalangan anak muda, nampaknya hanya terjadi dalam jangka pendek. Terbukti, reaksi balik (*backlash*) terhadap *woke capitalism* adalah fenomena yang nyata, tantangan terhadap perusahaan-perusahaan dengan praktik bisnis yang terlalu menekankan *environmental, social, and governance factor* (ESG) sudah terjadi dalam skala yang signifikan. Bukti paling baru dan nyata bahkan muncul di ranah regulasi pemerintah, di mana 18 negara bagian di Amerika Serikat telah memberlakukan undang-undang yang melarang lembaga keuangan melakukan bisnis dengan lembaga keuangan yang mempertimbangkan faktor ESG dalam keputusan investasi (Mirvis, 2023).

Demikianlah *woke capitalism* nampaknya punya masa depan suram karena hukum logika pasar sudah terbukti langgeng sepanjang sejarah peradaban manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bolton, K.R. (2022). Cultural Marxism: Origins, Development, and Significance. *The Journal of Social, Political and Economic Studies*, 43(3), 272-284.
- Dunne, T., et al. (2010). *International Relations Theories: Discipline and Diversity*. 2nd Edition. Oxford: Oxford University Press.
- Heywood, A. (2019). *Politics*. 5th Edition. London: Bloomsbury Academic.
- Meta Diversity. (2014). Retrieved from <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=567587973337709>.
- Mirvis, P. (2023). *In a War on 'Woke Capitalism', What's a Good Company to Do?* https://ssir.org/articles/entry/in_a_war_on_woke_capitalism_whats_a_good_company_to_do#
- Mirzaei, A. (2023). *Asal-Usul Kata Woke dan Mengapa Marketer Harus Berpikir Dua Kali Sebelum Terjun ke Aktivisme Sosial*. Retrieved from <https://theconversation.com/asal-usul-kata-woke-dan-mengapa-marketer-harus-berpikir-dua-kali-sebelum-terjun-ke-aktivisme-sosial-206209>.
- Oxford Learner's Dictionary. (n.d.). *Woke: Adjective*. Retrieved from https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/woke_2.
- Ramaswamy, V. (2021). *Woke, Inc.: Inside Corporate America's Social Justice Scam*. New York: Center Street.
- Rhodes, C. 2022. *Woke Capitalism: How Corporate Morality is Sabotaging Democracy*. Bristol: Bristol University Press.
- Serazio, M. (2024). *Your Favorite Brand No Longer Cares about Being Woke*. Retrieved from <https://www.vox.com/culture/351890/your-favorite-brand-no-longer-cares-about-being-woke>.
- Strachan, O. (2021). *Christianity and Wokeness: How the Social Justice Movements is Hijacking the Gospel and the Way to Stop It*. Washington D.C.: Salem Books.
- The Heritage Foundation. (2021). *Woke Corporate Capitalism*. Retrieved from <https://www.heritage.org/progressivism/heritage-explains/woke-corporate-capitalism>.